

Upaya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Negeri Nakupia Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah

Pietrics C Gaspersz¹ Fatimah Sialana² Jumiati Tuharea³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: [rickigaspersz26@gmail.com](mailto:rckigaspersz26@gmail.com)¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya bantuan langsung tunai (BLT) dalam mengurangi kemiskinan di negeri Nakupia Kecamatan TNS kabupaten Maluku Tengah. Program bantuan langsung tunai (BLT) dirancang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu akibat pandemic covid-19 dan juga akibat kenaikan harga BBM. Dengan itu pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu diadakannya bantuan langsung tunai (BLT) terkhusus untuk masyarakat yang terkategori kurang mampu atau miskin. Pemerintah Negeri Nakupia menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk di tuntaskan. Terutama kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah 15 orang masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai sebagai informan. Hasil penelitian bahwa Proses Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa masyarakat Nakupia memahami dengan benar tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai, sehingga proses penerimaan BLT-BBM di Negeri Nakupiah berjalan dengan baik sekalipun terjadi masalah namun hal itu dapat diselesaikan oleh pemerintah negeri Nakupia, Dalam prosesnya, penerima harus memenuhi syarat-syarat seperti :Warga negara Indonesia, memiliki KTP dan KK, bukan PNS/TNI/POLRI, terdaftar sebagai penerima BLT-BBM pada data kemneterian sosial. Masing-masing penerima menerima perbulan Rp.300.000, dan didapatkan triwulan sebesar Rp. 900.000.00. Dampak (Positif dan Negatif) Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat bahwa Proses pembayaran sering terlambat namun mungkin hal itu disebabkan oleh masalah adminstrasi, namun selanjutnya proses pembayaran kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, dampak negative dari penyaluran BLT bagi masyarakat Nakupia dilain sisi membawah dampak postif namun disatu sisi membawah dampak negatif, hal itu dapat dirasakan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Upaya, BLT, Kemiskinan

Abstract

This research aims to determine the efforts of direct cash assistance (BLT) in reducing poverty in Nakupia country, TNS subdistrict, Central Maluku district. The direct cash assistance (BLT) program is designed to help people who are less fortunate due to the Covid-19 pandemic and also due to the increase in fuel prices. With this assistance, the government created a policy, namely providing direct cash (BLT) specifically for people who are categorized as underprivileged or poor. The Nakupia State Government has made the problem of poverty their main focus for solving. Especially poverty caused by the Covid-19 pandemic and the increase in fuel oil (BBM) prices. The type of research used is descriptive qualitative research. In this research, the subjects were 15 people from the community who received direct cash assistance as informants. The results of the research show that the process of implementing direct cash assistance (BLT) is that the people of Nakupia understand correctly about the implementation of direct cash assistance, so that the process of receiving BLT-BBM in Nakupiah Country runs well even though problems occur, but this can be resolved by the government of Nakupia Country. In the process, the recipient must meet the following requirements: Indonesian citizen, have a KTP and Family Card, not a PNS/TNI/POLRI, registered as a BLT-BBM recipient in the Ministry of Social Affairs data. Each recipient receives Rp. 300,000 per month, and quarterly Rp. 900,000.00. The impact (Positive and Negative) of Direct Cash Assistance (BLT) on community welfare is that the payment process is often late but perhaps this is caused by administrative problems, but then the payment process to the community continues to run well, the negative impact of

BLT distribution for the Nakupia community on the other hand brings a positive impact but on the one hand it has a negative impact, this can be felt in society.

Keywords: *Effort, BLT, Poverty*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemiskinan tidak akan pernah ada habisnya. masalah kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat fenomenal dalam sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membawa banyak dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Karena kemiskinan membuat jutaan anak-anak bangsa yang tidak bisa mengenyam pendidikan, masyarakat yang sulit membiayai kehidupan pokok, sulit membiayai kesehatannya, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga dan masih banyak lagi bentuk kemiskinan lainnya yang menyebabkan tidak adanya kesejahteraan didalam masyarakat. Yang lebih parahnya lagi adalah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, papan dan sandang secara terbatas (Eddy Kiswanto, 13 : 2009).

Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan dimasyarakat, selain karena kurangnya akses ke pelayanan publik, dan kurangnya lapangan pekerjaan juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor mulai dari faktor bencana/musibah. Contoh yang paling nyata adalah adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain karena covid-19 juga dikarenakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama golongan masyarakat yang terkategori miskin atau kurang mampu. Banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan tentang kemiskinan sehingga menimbulkan persepsi yang beragam dari berbagai kalangan. Darwin mendefinisikan kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau suatu keluarga yang berada dalam kondisi kekurangan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu. Ketidak atau kekurangmampuan fisik manusia, ketidak atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan (Umi Listyaningsih, 13 : 2020)

Kemiskinan telah menjadi masalah sosial yang masih belum terselesaikan bahkan bisa dikatakan sangat sulit diselesaikan bila peran dan tugas dari pemerintah sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat tidak bekerja dengan maksimal. Tetapi satu hal yang perlu juga ditegaskan disini adalah bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja tetapi tanggung jawab semua masyarakat Indonesia, bagaimana semua masyarakat saling bahu membahu dalam membangun negara. Bisa dilakukan dengan mendukung segala kegiatan pemerintah yang berpotensi untuk mengembangkan serta meningkatkan sumber daya alam dan juga diperlukan sumber daya manusia yang bagus atau yang cukup berpotensi. Karena kurangnya sumber daya manusia adalah salah satu faktor dari adanya kemiskinan. Misalnya pemerintah telah menyiapkan lapangan kerja tetapi bila sumber daya manusianya kurang/terbatas maka orang dari luar akan dengan mudah memonopoli lapangan kerja yang ada di negara kita.

Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah dengan diadakanya Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada

masyarakat miskin (Irwan Akib, 2016 : 126). Mekanisme penyelenggaraan BLT dana desa diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN dimana desa wajib untuk menyelenggarakan BLT dana desa paling sedikit 40% dari dana desa yang diterima. Amanat inipun kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.07 tentang pengelolaan dana desa yang didalamnya memuat mekanisme rincian penggunaan dana desa pada tahun 2022 yang salah satunya mekanisme BLT dana desa. Pemerintah desa pun kemudian menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tersebut mengadakan musyawarah desa untuk membahas pendataan calon penerima BLT dana desa (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Sesuai dengan UU NO.11 pasal 14 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengatakan bahwa “Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari skema perlindungan sosial”. Perlindungan sosial ini bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar nominal. BLT juga merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Bantuan langsung tunai ini mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten telah memperhatikan keluarga masyarakat yang miskin atau yang tergolong tidak mampu. Selain dikarenakan oleh adanya pandemi covid-19, juga dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena kenaikan harga BBM, hal inilah yang sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk melindungi masyarakat yang terdampak, pemerintah hadir dengan meyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Program bantuan langsung tunai (BLT) dirancang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu akibat pandemic covid-19 dan juga akibat kenaikan harga BBM. Melihat program pemerintah tersebut, upaya pemberantasan kemiskinan di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat awam beramai-ramai memuji pemerintah atas program BLT. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran BLT. Dalam hal pemberian BLT kepada masyarakat, tentunya ada persyaratan atau kriteria khusus, dan yang pastinya adalah masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampulah yang layak untuk mendapatkan BLT. Fungsi dari BLT juga patut di pertanyakan apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini betul-betul mampu atau bisa mengatasi masalah perekonomian masyarakat di Negeri Nakupia atau tidak, dan apakah masyarakat Negeri Nakupia menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar atau malah digunakan untuk memenuhi keinginan mereka. Karena banyak masyarakat yang menyalahgunakan fungsi BLT yang tadinya fungsinya dibuat untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi orang menggunakannya untuk hal yang dirasa kurang penting (Irwan Akib, 2016 : 126-128).

Masyarakat Negeri Nakupia juga sedang mengalami hal yang sama yaitu mengalami krisis ekonomi, terutama semenjak pandemi covid-19. selain dikarenakan pandemi covid-19 juga dikarenakan oleh kenaikan harga BBM yang menyebabkan banyak masyarakat yang sulit bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kenaikan BBM ini sangat berpengaruh terhadap semua aspek dalam hal ini kebutuhan manusia. Dikarenakan BBM naik maka segala penjual atau pedagang pun ikut menaikkan harga barang yang mereka jual dengan alasan bahwa harga BBM naik. Jadi kenaikan BBM ini berpengaruh ke semua aspek. Contoh karena BBM naik maka tarif angkot atau ojek menjadi

naik, penjual dipasar yang menjual apapun itu menaikkan harga barang yang mereka jual karena dengan alasan harga BBM naik. Banyak masyarakat Negeri Nakupia yang dengan berat hati atau tidak terima dengan kebijakan dari pemerintah menaikkan harga BBM terutama masyarakat dikalangan rendah atau miskin. Karena bagi masyarakat yang kurang mampu kenaikan harga BBM ini akan menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari. Dengan itu pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu diadakanya bantuan langsung tunai (BLT) terkhusus untuk masyarakat yang terkategori kurang mampu atau miskin. Pemerintah Negeri Nakupia menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk di tuntaskan. Terutama kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah 15 orang masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai sebagai informan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data deskripsi kualitatif dengan menggunakan analisa model interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) di Negeri Nakupia Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin mengakibatkan masyarakat masih tetap hidup dalam kemiskinan dan belum merasakan keadilan dalam penyaluran BLT. Pemahaman masyarakat terhadap BLT sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat oleh sebab itu masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang BLT. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Lambertus D. Telussa (65 tahun) pada 29 September 2023 selaku masyarakat Negeri Nakupia yang mendapatkan BLT mengatakan bahwa : "Proses pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) yang kami ketahui adalah bantuan-bantuan langsung tunai yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat akibat terjadinya kenaikan BBM di Indonesia yang berdampak pada masyarakat Nakupia". Hal diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh bapak Martehen Matulesy (41 Tahun) pada 29 September 2023 selaku masyarakat Negeri Nakupia bahwa: "BLT itu kepanjangan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin atau prasejahtera".

Terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap BLT. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Juneidi Pesiwarisa (46 Tahun), bapak Pieter Salakay (63 Tahun), bapak Markus Telussa (68 Tahun), Bapak Yakop Gaspersz dan bapak Fredy Talutu (24 Tahun) sebagai masyarakat Nakupia bahwa BLT merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan hal itu sejalan dengan pendapat informan sebelumnya. Menurut Akib & Risfaisal, (2015) bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. Menurut peneliti bahwa BLT itu singkatannya dari bantuan langsung tunai yang merupakan program pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan BBM dan masalah-masalah sosial lainnya dan diperuntuhkan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan atau dalam kategori prasejahtera. Berdasarkan data observasi, hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima BLT pada Negeri

Nakupia memahami secara benar tentang bantuan langsung tunai yang merupakan program pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut pendapat bapak Juneidi Pesiwarisa (46 Tahun), bapak Pieter Salakay (63 Tahun), bapak Markus Telussa (68 Tahun), Bapak Yakop Gaspersz dan bapak Fredy Talutu (24 Tahun) bahwa Penerimaan BLT-BBM di Negeri Nakupia sudah berlangsung sejak tahun 2020 yaitu pada masa pandemic covid 19 hingga sampai sekarang ini dan mereka masih terdaftar sebagai penerima BLT-BBM tersebut.

Kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah pada September 2022. Dengan keluarnya peraturan meteri keuangan Nomor 134 tahun 2022 tentang pengimplementasian bantuan langsung tunai (BLT) BBM Sehingga BLT BBM baru dilaksanakan pada tahun 2022. (Albrina, 2023) Pendapat peneliti bahwa masyarakat terkadang sedikit sulit membendahkan BLT karena ada beberapa jenis BLT yang diperoleh masyarakat. Secara umum program bantuan tunai dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu program yang diberikan dengan syarat tertentu (CCT) dan program yang diberikan tanpa syarat (UCT). Kedua jenis program ini digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dengan pendekatan yang berbeda. Program bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam jenis program bantuan tunai tidak bersyarat. BLT adalah dana tunai yang diberikan untuk menjaga daya beli rumah tangga yang miskin dan rentan dari dampak kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM (Salam et al., 2023) Sehubungan dengan hal diatas, ada persyaratan-persyaratan dalam penerimaan BLT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan bapak Lambertus D. Telussa (65 tahun) dan bapak Fredy Talutu (24 Tahun), bapak Juneidi Pesiwarisa (46 Tahun), bapak Pieter Salakay (63 Tahun), pada tanggal 29 September 2023 sebagai masyarakat Negeri Nakupia bahwa: "Persyaratan penerimaan BLT-BBM itu ada beberapa dokumen yang harus disiapkan yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga itu dokumen penting yang harus disiapkan oleh penerima BLT tersebut".

Hal lain ditambahkan menurut bapak Markus Telussa (68 Tahun), Bapak Yakop Gaspersz dan bapak Fredy Talutu (24 Tahun) pada tanggal 30 September 2023 sebagai masyarakat penerima BLT-BBM bahwa: "Kalau persyaratan itu kita memasukkan data yaitu berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, setelah itu terdaftar dalam data kementerian sosial sebagai penerima BLT BBM". Sementara itu, menurut Bapak Hendriks Gaspersz (43 Tahun) pada tanggal 30 September 2023, selaku Kaur Pemberdayaan Pemerintah Negeri Nakupia beliau mengatakan bahwa: "Syarat penerima BLT-BBM itu yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan KK serta memiliki penghasilan, kemudian terdaftar dalam DTKS serta bukan sebagai PNS atau TNI/POLRI. Itu yang penting yang harus disiapkan selain itu pula penerima akan mendapatkan undangan untuk hadir dalam proses pencairan". Berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2022 bahwa terdapat syarat penerima BLT-BBM yaitu sebagai berikut : Warga miskin atau rentan miskin Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI atau Polri Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS Kemensos Warga atau pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta.

Berdasarkan data observasi, hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa syarat yang mestinya disiapkan adalah Warga negara Indonesia, memiliki KTP dan KK, bukan PNS/TNI/POLRI, terdaftar sebagai penerima BLT-BBM pada data kementerian sosial. Selanjutnya proses pembayaran BLT. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Lambertus D. Telussa (65 tahun) dan bapak bapak Fredy Talutu (24 Tahun) pada 29 September 2023 sebagai masyarakat Negeri Nakupia mengatakan bahwa: "Proses pembayaran BLT di Negeri Nakupia, selama ini dibayar langsung tunai kepada kami penerima dan pembayarannya diawali dengan penerima bantuan mendapatkan informasi dari pemerintah negeri tentang penerimaan BLT, waktu dan tempat penerimaan". Menurut bapak Markus Telussa (68 Tahun) dan bapak Juneidi Pesiwarisa (46 Tahun) dan Bapak Marthen Matulesy

(41 Tahun) pada 30 September 2023 selaku masyarakat penerima BLT di Negeri Nakupia mengatakan bahwa: "Pembayaran BLT, proses dimulai dari penyampaian informasi dari pemerintah negeri melalui grup whatsapp, setelah itu masing-masing penerima menunjukkan KTP untuk selanjutnya memperoleh pencairan dana BLT". Hal yang lain disampaikan berdasarkan hasil penelitan dengan bapak Juneidi Peswarisa (46 Tahun) pada 30 September 2023 selaku masyarakat penerima BLT di Negeri Nakupia mengatakan bahwa: "Jadi BLT itu langsung diberikan di balai negeri oleh bagian pemberdayaaan, setelah itu diambil gambar dan penerima BLT menandatangani daftar setelah itu mendapatkan bantuan tersebut".

Sementara itu, menurut Bapak Hendriks Gaspersz (43 Tahun) pada tanggal 30 September 2023, selaku Kaur Pemberdayaan Pemerintah Negeri Nakupia beliau mengatakan bahwa: "Jadi setelah proses pendataan, kemudian pencairan itu dalam prosesnya yaitu kami menginformasikan kepada penerima melalui grup WA yang didalamnya terdapat no kontak penerima, selain itu juga kami sampaikan melalui surat kepada masing-masing penerima untuk hadir dan langsung menuju bagian pemberdayaan untuk langsung melaksanakan proses pencairan". Menurut hasil penelitian Farmin Yusuf (2023) bahwa Pencairan dan penyaluran di Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tersebut. Setelah itu, akan dilakukan proses verifikasi kepada masyarakat yang terkafer sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai untuk mengecek apakah benar bahwa penerima BLT memang layak untuk menerima bantuan. Proses verifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah desa bisa tahu apakah ada masyarakat yang tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. Pendapat peneliti bahwa tahapan proses pembayaran BLT di Negeri Nakupia sudah berjalan dengan baik yang dimulai dari tahap pendataan sampai tahap pencairan sudah berlangsung dengan baik, dimana kategori masyarakat miskin pada negri ini sudah terdata dengan baik oleh pemerintah negeri, dan pembayaran dilakukan secara transparan di kantor negeri nakupia. Berdasarkan data observasi, hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran BLT berjalan dengan baik, dimana pemerintah negeri menginformasikan kepada penerima, setelah itu proses pembayaran dilakukan di kantor negeri.

Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat

Selanjutnya Keadaan penyaluran BLT akhir-Akhir ini di Negeri Nakupia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Juenedi Peswarissa (46 tahun) pada 30 September 2023 sebagai masyarakat Negeri Nakupia yang mendapatkan BLT mengatakan bahwa: "Proses penyaluran BLT belakangan ini, kendang terlambat yang berbedah dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun saya tetap bersabar dengan menghadapi keadaan seperti itu". Hasil wawancara responden dengan informan bapak Fredy Talutu (24 Tahun) pada 29 September 2023 selaku masyarakat penerima BLT Negeri Nakupia, mengatakan bahwa: "Keadaan penyaluran Bantuan langsung tunai yang saya terima di Negeri Nakupia yaitu baik bagi masyarakat". Menurut bapak Markus Telussa (68 Tahun) dan bapak Juneidi Peswarisa (46 Tahun) dan Bapak Marthen Matulesy (41 Tahun) pada 30 September 2023 selaku masyarakat penerima BLT di Negeri Nakupia mengatakan bahwa: "Prosesnya penyaluran berjalan dengan baik dengan proses pembayaran tunai dan proses tersebut langsung disaksikan oleh pemerintah negeri, terkadang sering terlambat namun tetap dibayar". Sementara itu, menurut Bapak Hendriks Gaspersz (43 Tahun) pada tanggal 30 September 2023, selaku Kaur Pemberdayaan Pemerintah Negeri Nakupia beliau mengatakan bahwa: "Akhir-akhir ini proses penyaluran sedikit mengalami keterlambatan pada saat pembayaran saja berbeda dengan

Hambatan yang terjadi pertama kali penyaluran BLT-DD yaitu telat penyaluran bantuan kepada masyarakat karena sebelum ini tidak ada data khusus penerima BLT-DD, sehingga panitia harus mendata masyarakat miskin dan tidak termasuk dari masyarakat penerima PKH, BPNT dan Kartu Prakerja”.

Menurut Hayaton Nufus (2022:70) keterlambatan penyaluran dikarenakan efek socialdistance yang harus diterapkan di lingkungan masyarakat dan harus menerapkan protokol kesehatan serta penyesuaian data kelayakan penerima BLT-DD dalam proses penyaluran BLT-DD, seperti saat proses pendataan panitia harus ke rumah masyarakat untuk proses pendataan, selanjutnya pada proses penyaluran panitia turun langsung ke rumah masyarakat untuk penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai. Pendapat peneliti bahwa keadaan penyaluran BLT akhir-Akhir ini di Negeri Nakupia tetap dilaksanakan oleh pemerintah Negeri dalam melakukan pembayaran. Proses pembayaran sering terlambat namun mungkin hal itu disebabkan oleh masalah adminstrasi, namun selanjutnya proses pembayaran kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, Berdasarkan data observasi, hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa keadaan penyaluran BLT akhir-Akhir ini di Negeri Nakupia berjalan dengan baik. Selanjutnya, dampak negatif dari penyalurasn BLT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan bapak Juenedi Pesiwariisa (46 tahun) pada 30 September 2023 selaku masyarakat Negeri Nakupia yang menerima BLT mengatakan bahwa: “Kalau dampak negatif dari penyaluran BLT, menurut saya tidak ada karena BLT itu berdampak positif bagi masyarakat di negeri ini. Hanya saja dengan penyaluran BLT ada terjadi kecemburuan dari keluarga-keluarga yang tidak menerima BLT”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Yakob Gaspersz (73 tahun) pada 30 September 2023 selaku masyarakat Negeri Nakupia yang mendapatkan BLT mengatakan bahwa: “Penyaluran BLT dapat berdampak kehidupan masyarakat, karena disuatu sisi membawah dampak positif namun bagi masyarakat, namun penyaluran BLT juga bisa membawah dampak negatif. Penyaluran BLT itu untuk membantu menopang kebutuhan masyarakat. Namun sebagian masyarakat berfikir ada terima BLT sehingga tidak mau untuk bekerja lagi”. Pendapat lain disampaikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Markus Telussa (68 tahun), Lambertus Telussa (65 Tahun), dan Marthen Matulesy, (41 Tahun) dan Fredy Talutu (24 Tahun) pada 29 - 30 September 2023 selaku masyarakat Negeri Nakupia yang mendapatkan BLT mengatakan bahwa: “Penyaluran BLT selama ini tidak membawah damak negatif namun yang kami tahu, BLT itu pembayaran tunai yang manfaatnya supaya masyarakat miskin dapat mempergunakan sebaik mungkin dalam mencukupi kebutuhan keluarga mereka”. Sementara itu, menurut Bapak Hendriks Gaspersz (43 Tahun) pada tanggal 30 September 2023, selaku Kaur Pemberdayaan Pemerintah Negeri Nakupia beliau mengatakan bahwa: “Penyaluran BLT membawa dampak negatif bagi masyarakat hal itu dikarenakan masyarakat yang hidup mereka terpergantung dari BLT sehingga masyarakat menjadi malas untuk bekerja karena tahu ada bantuan yang mereka terima. Ketergantungan masyarakat pada BLT merupakan pemahaman yang keliru karena pemerintah menyelenggarakan BLT hanya membantu masyarakat menopang kehidupan masyarakat pasca covid 19 yang mengakibatkan kebutuhan pokok menjadi mahal”.

Menurut Irwan Akib dan Risfaisal (2016) bahwa banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain:

1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

3. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat.
4. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak
5. Peran aktif masyarakat yang kurang / minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan
6. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

Pendapat peneliti bahwa dampak negatif dari penyaluran BLT bagi masyarakat Nakupia dilain sisi membawah dampak positif namun disatu sisi membawah dampak negative, hal itu dapat dirasakan dalam masyarakat. Padahal selain BLT, ada juga bantuan-bantuan lain yang dapat di nikmati oleh masyarakat penerima seperti PKH, Bansos. Namun Sebagian masyarakat mempersoal penerimaan BLT tersebut. Berdasarkan data observasi, hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak negatif dari penyaluran BLT yaitu masyarakat merasa terpergantung pada BLT, BLT dapat memicu konflik dalam masyarakat. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah negeri maupun masyarakat bila terdapat hal negatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Juenedi Pesiwari (46 tahun) pada 30 September 2023 selaku masyarakat Negeri Nakupia yang mendapatkan BLT mengatakan bahwa: "Upaya yang diberikan supaya jangan sampai memicu konflik yaitu memberikan pengertian yang baik bagi keluarga tersebut atau oknum yang mempersoalkan masalah tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Marthen Matulesy (41 Tahun) pada 29 September 2023 selaku masyarakat Negeri Nakupia bahwa: "Yang harus dilakukan oleh pemerintah negeri Nakupia yaitu melakukan musyawara dengan orang-orang tersebut supaya tidak terjadi konflik, oleh sebab itu masyarakat seharusnya di berikan sosialisasi terlebih dahulu supaya semuanya berjalan dengan baik". Sementara itu, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Lambertus Telussa (65 Tahun) dan bapak Fredy Talutu (24 Tahun) pada 29 September 2023 sebagai masyarakat Negeri Nakupia yang mendapatkan BLT mengatakan bahwa: "Yang harus dilakukan oleh pemerintah negeri adalah harus mengatasi masalah tersebut dan menjaga agar tidak terjadi masalah yang akan mengganggu proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dan pemerintah negeri dapat mengatasi dengan baik dan bijaksana agar masyarakat merasa nyaman, aman". Sementara itu, menurut Bapak Hendriks Gaspersz (43 Tahun) pada tanggal 30 September 2023, selaku Kaur Pemberdayaan Pemerintah Negeri Nakupia beliau mengatakan bahwa: "Upaya pemerintah negeri Nakupia terkait BLT, bahwa Pemerintah negeri Nakupiah telah melakukan pendataan secara adil, dan telah membagi masyarakat dalam menerima bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga bila ada masalah terkait dengan itu, maka kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik di kantor negeri".

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

1. Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK.
2. Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan system ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga

dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

3. Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.

Pendapat peneliti bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah negeri maupun masyarakat bila terdapat hal negatif yaitu pemerintah negeri harus melakukan panggila terdapat oknum tersebut kemudian melakukan penjelasan dengan baik di kantor negeri sehingga tidak terjadi konflik yang meluas. Berdasarkan data observasi, hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak negatif dari penyaluran BLT yaitu masyarakat merasa terpergantung pada BLT, BLT dapat memicu konflik dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Proses Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa masyarakat Nakupia memahami dengan benar tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai, sehingga proses penerimaan BLT-BBM di Negeri Nakupiah berjalan dengan baik sekalipun terjadi masalah namun hal itu dapat diselesaikan oleh pemerintah negeri Nakupia, Dalam prosesnya, penerima harus memenuhi syarat-syarat seperti :Warga negara Indonesia, memiliki KTP dan KK, bukan PNS/TNI/POLRI, terdaftar sebagai penerima BLT-BBM pada data kemneterian sosial. Masing-masing penerima menerima perbulan Rp.300.000, dan didapatkan triwulan sebesar Rp. 900.000.00.
2. Dampak (Positif dan Negatif) Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat bahwa Proses pembayaran sering terlambat namun mungkin hal itu disebabkan oleh masalah adminstrasi, namun selanjutnya proses pembayaran kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, dampak negative dari penyaluran BLT bagi masyarakat Nakupia dilain sisi membawah dampak positif namun disatu sisi membawah dampak negatif, hal itu dapat dirasakan dalam masyarakat. Padahal selain BLT, ada juga bantuan-bantuan lain yang dapat di nikmati oleh masyarakat penerima seperti PKH, Bansos. Namun Sebagian masyarakat mempersoal penerimaan BLT tersebut.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini melalui media tulisan penulis menghanturkan terima kasih dan bangga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendorong dan juga memotivasi pada pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. F Sialana S.Pd.,M.Pd sebagai pembimbing I dan R. Hatala S.Pd.,M.Pd sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing serta membekali, memberi arahan dengan penuh kasih dan memotivasi serta selalu mendoakan penulis dalam setiap proses pembimbingan berlangsung hingga selesai dalam penelitan ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mengajar, membimbing, membina serta mendidik penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan baik di dalam maupun di luar ruangan selama proses perkuliahan.
3. Untuk kedua orang tuaku yang tidak pernah putus berdoa, dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya sehingga berada di titik ini..
4. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa berada pada tahap ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Puji Dyah Rochmah Nur, et all. (2016). Sistem penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan metode anality calhirarchy process, jurnal informatika, vol 2, no 2, juli 2008
- Eka Rahayuningsih. (2021) Implementasi Kebijakan Dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa Pada Korban Covid-19 di Desa Bulumargi Perspektif Masalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021
- Elinpike. (2010) Dampak Bantuan langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus : Kota Bandung, Blok Elinpike
- Irfan Sofi. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa
- Muh. Yusuf Sulaiman. (2021) Dampak Bantuan langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Panirannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
- Putri Amalia Harefa. (2022). Peran Pemerintah dalam mengurangi Kemiskinan, jurnal El;Thawalib vol 3, No 2 (2022)
- Rajak, Adam. (2015). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Komunitas Adat Terpencil. Universitas Gorontalo
- Regina Wowiling. (2022) Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Jurnal Politico 11 (1), 2022
- Reza Attabiurrobbi Annur. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus
- Umi Listyaningsih & Edi Kiswanto. (2009) Bantuan Langsung Tunai Mengatasi Masalah Dengan Masalah